

The cover features a light blue background with a white border. A large, abstract geometric shape in a darker shade of blue occupies the bottom half, with a white diagonal line cutting through it. The title is centered in the upper half, and the institution's name is centered in the lower half.

RANCANGAN RENJA

2025

DINAS TENAGA KERJA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen ini dengan baik. Rancangan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan RENSTRA Transisi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026.

Di dalam Rancangan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini dijabarkan berbagai rencana tujuan dan sasaran serta program kegiatan prioritas setelah dilakukan penelaahan terhadap capaian kinerja periode sebelumnya.

Rancangan Renja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 guna pencapaian kinerja dinas dalam kurun waktu satu tahun.

Akhir kata, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA
KERJA KOTA PANGKALPINANG,



ENDANG SUPRIYADI, S.T., M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760612 200003 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra perangkat daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen perangkat daerah, Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Renja Perangkat daerah disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara partisipatif.

Dokumen ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran perangkat daerah Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
 13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 14. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Renja Tenaga Kerja Tahun 2025 adalah untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 serta proyeksi tahun 2026;
2. Sebagai sarana untuk mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja;
3. Mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renja tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 4.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

1.3 Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

TRIWULAN IV

Evaluasi Terhadap Hasil Renja

Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
											I		II		III		IV								
											1	2	3	4	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	16
1	-	020702	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:Persen)	80	144.962.300	0	0	85	360.000	0	0	0	0	80.950	0	85.710	360.000	85.710	360.000	85.710	360.000	100	0,248	B I D A N G KETENAGAKERJAAN
				Persentase tenaga kerja formal (Dengan Satuan:Persen)	71		0		71		0		0		0		0		0		0		0		B I D A N G KETENAGAKERJAAN
				Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Dengan Satuan:Persen)	5,300		0		5,300		0		0		0		0		0		0		0		B I D A N G KETENAGAKERJAAN
				Tingkat setengah pengangguran (Dengan Satuan:Persen)	3,190		0		3,190		0		0		0		0		0		0		0		B I D A N G KETENAGAKERJAAN
2		020702101	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah laporan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) (Dengan Satuan:Laporan)	0	144.962.300	0	0	1	360.000	0	0	0	0	0	0	1	360.000	1	360.000	1	360.000	100	0,248	SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA, PELATIHAN

			persentase tercapainya kasubus h n . administrasi aparatur dan (Dengan Satuan/Person)	100		0	100		100		100		100		100		100		100		100		100		SEKRETARIS
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan/Person)	100		0	100		100		100		100		97,630		97,630		97,630		97,630		97,630		SEKRETARIS
23		021801203	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah i D e n g a n Satuan/Laporan)	0	14.907.607.222	0	0	1	5.557.247.208	0	987.798.012	0	2.011.426.709	0	1.197.499.836	1	1.344.680.800	1	5.441.405.357	1	5.441.405.357	100	36,301	SUB KORDINATOR KEUANGAN
24		021801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN i D e n g a n Satuan/Orang/Bulan)	0	14.907.607.222	0	0	46	5.557.247.208	46	987.798.012	46	2.011.426.709	46	1.197.499.836	46	1.344.680.800	46	5.441.405.357	46	5.441.405.357	100	36,301	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		021801205	A-d-m-i-n-i-s-t-r-a-s-i kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan/Laporan)	0	281.000.000	0	0	1	111.100.000	0	0	0	0	0	0	0	11.100.000	0	51.100.000	0	51.100.000	0	18,250	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		021801205002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan/Paket)	0	112.000.000	0	0	73	51.100.000	0	0	0	0	0	0	73	51.100.000	73	51.100.000	73	51.100.000	100	45,825	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
27		021801205009	Pendidikan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan/Orang)	0	168.000.000	0	0	6	60.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
28		021801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah i D e n g a n Satuan/Laporan)	0	548.815.009	0	0	5	545.202.051	0	49.826.088	0	132.452.470	0	32.388.448	1	304.922.898	1	525.519.914	1	525.519.914	100	91,256	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
29		021801206001	Penyediaan Komputerisasi Listrik/Perangkat Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komputer Instalasi Listrik/Perangkat Bangunan Kantor yang Dibebaskan (Dengan Satuan/Paket)	0	14.483.182	0	0	1	9.134.400	0	0	1	3.720.000	0	0	1	3.952.488	1	7.672.488	1	7.672.488	100	51,048	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
30		021801206003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibebaskan (Dengan Satuan/Paket)	0	730.057.530	0	0	10	171.454.375	0	0	8	108.400.000	0	0	11	87.729.289	11	168.129.359	11	168.129.359	100	100	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

[illegible]

DATA BATA CAPALAN KONTROL (IN)

SPRINGFIELD, Vt. 05401-1001

44	03/003	P R O G R A M PEMBERANGKAN KEIM- PRESANAAH MODAL	10	340.740.320	0	10	47.793.096	81.120	4.378.616	704.420	7.367.924	97.840	25.167.924	11.840	3.982.232	11.840	48.786.696	11.840	23.680	13.720	BIJANG PENANAHAN MODAL
----	--------	--	----	-------------	---	----	------------	--------	-----------	---------	-----------	--------	------------	--------	-----------	--------	------------	--------	--------	--------	------------------------------

[illegible]

KATA-KATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SUMBA PROGRAM (N)									
PREDIKSI KINERJA									
- Kondisi lingkungan dan pelaksanaan kegiatan - Penerimaan target sebelum optimal - Beberapa capaian indikator program bidang keterampilan masih kurang dikarenakan masih menunggu rilisnya data dari BPS - Capaian pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair masih menunggu pelaksanaan proses recruitment perusahaan - Capaian program promosi penempatan modal -30,54 karena capaian ini masih tidak tercapai akibat									
Tidak terdapat yang diperlukan dalam trivulan berikutnya									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		- Kualitas pimpinan dan pelaksana kegiatan																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		- Pemenuhan target belum optimal - Belum ada capaian indikator program bidang ketenagakerjaan masih kurang dikarenakan masih menunggu rilisnya data dari BPS - Capaian penciptaan kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair masih menunggu selainya proses recruitment penunbuan - Capaian program promosi penanaman modal -30,54 karena capaian inihius tidak terbacsa akan																				
Terdas lanjut yang diperlukan dalam trivulan berikutnya		--																				
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah sampai dengan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan 2023				Realisasi Kinerja Pada Trivulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang diervaluasi Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2023	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Tidak terdapat yang diperlukan dalam rencana Perangkat Daerah, jika demikian:

- Melakukan penyesuaian/penghitungan kembali target pada saat perubahan dan melakukan penyesuaian target pada periode perencanaan berikutnya, berdasarkan realisasi tahun sebelumnya

Dievaluasi

Kota Pangkalpinang, tanggal 10-01-2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

ENDANG SUPRIYADI, S.T., M.T.

NIP.197606122000031003

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PANGKALPINANG

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat at Daerah sampai dengan Renja Perangkat at Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah 2024 s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksan aan Renja PD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Pera ngka t Daer ah Pena nggu ngja wab			
								I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	12(a) = 12/7x 100%	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15								
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		Program pelatiha n kerja dan produkti vitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat kan pelatihan					77,00	%	261.956.500,00			-	-	-	-			0,00%				DPM PTS P&N AKER

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		aan di daerah kabupaten/kota	Kabupaten / Kota																									
		Sub kegiatan penyelesaian hubungan industri, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/dampak pada kepentingan di 1 daerah kabupaten/kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan					40	p er k ar a	25.352.946,00	3	6.067.924,00						3,00	6.067.924,00	7,50%	23,93%							

[illegible]

[illegible]

		Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah																							
		sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1	paket	11.446.800,00	1						1,00	-	100,00%	0,00%						
		sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5	paket	42.011.200,00	5	2.490.000,00					5,00	2.490.000,00	100,00%	5,93%						
		sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2	paket	30.271.400,00	1						1,00	-	50,00%	0,00%						

[illegible]

		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1	laporan	148.322.976,00	1	18.393.080,00						1,00	18.393.080,00	100,00%	12,40%						
		kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik						100	%	279.513.392,00	97,63	33.418.156,00															
		sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1	unit	49.500.000,00	1	8.032.924,00						1,00	8.032.924,00	100,00%	16,23%						

		gan Dinas atau Kendara an Dinas Jabatan																									
		sub kegiatan Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak dan Perizina n Kendara an Dinas Operasi onal atau Lapanga n	Jumlah Kendaraa n Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya					9	u ni t	79.310.0 00,00	6	18.628.00 0,00						6,00	18.628.0 00,00	66,67%	23,49%						
		sub kegiatan Pemelih araan/R ehabilita si Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/					1	u ni t	150.703. 392,00	1	6.757.232, 00						1,00	6.757.23 2,00	100,00%	4,48%						

[illegible]

6	program promosi penana man modal	jumlah investor PMDN						500	N IB	174.652. 696,00	2.521	6.067.924, 00	-	-	-	2.521	6.067.92 4,00	504,20%	3,47%					DPM PTS P&N AKE R
	kegiatan Penyele nggaraa n Promosi Penana man Modal yang menjadi Kewena ngan Daerah Kabupat en/Kota	jumlah event yang diikuti						2	e v e nt	174.652. 696,00	0	6.067.924, 00												
	sub kegiatan pelaksa naan kegiatan promosi penana man modal daerah kabupat en/ kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanama n Modal Kabupaten /Kota						1	d o k	174.652. 696,00	0	6.067.924, 00				-	6.067.92 4,00	0,00%	3,47%					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		504,20%	3,47%					
Predikat Kinerja																		ST	SR					

		Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																								
		sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota					1	do k	3.400.000,00	0						0	-	0,00%	0,00%						
		sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha					4000	pelaku usaha	239.940.932,00	4544	29.150.312,00					4.544	29.150.312,00	113,60%	12,15%						

[illegible]

8	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM					20,00	%	445.853.692,00		18.313.361,00		-	-	-		18.313.361,00		4,11%					DPM PTS P&N AKER
	kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					1	laporan	445.853.692,00		18.313.361,00													
	sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam					5	kegiatan	24.031.900,00								-	0,00%	0,00%					

		Usaha dalam merealisasi Kegiatan Usahanya	merealiskan Kegiatan Usahanya																								
		sub kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko					140	pelaku usaha	261.946,338,00		11.495.437,00						-	11.495.437,00	0,00%	4,39%						

		sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha						9	k e g i a t a n u s a h a	159.875.454,00		6.817.924,00						-	6.817.924,00	0,00%	4,26%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																				0,00%	4,11%							
Predikat Kinerja																				SR	SR							
9		program pengelolaan data dan sistem informasi	persentase izin yang diterbitkan secara online						100,00	%	93.695.892,00	88,64	8.757.232,00		-		-	-	88,64	8.757.232,00	88,64%	9,35%						DPM PTS P&N AKER

[illegible]

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan bahwa Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki anggaran sebesar Rp.8.531.004.004,00 dengan pembagian anggaran bagi urusan tenaga kerja sebesar Rp.577.256.274,00.

Urusan tenaga kerja mengampu 3 (tiga) program, 4 (empat) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan. Capaian kinerja dan keuangan masih sangat rendah dikarenakan banyak kegiatan yang memang jadwal pelaksanaannya mulai triwulan kedua dan ketiga.

Terutama untuk capaian program masih ada yang belum terisi dikarenakan masih dalam proses pengolahan data oleh bidang penanggung jawabnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan tenaga kerja Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu tenaga kerja.

Pencapaian IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	76,36%	54,55 %	71,43%
	Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	19,09%	16,67%	87,32%

Sedangkan capaian IKU Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90,00	0	Rencana pelaksanaan kegiatan pendataan di tw 3
	persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	6,40	0	Masih menunggu data dari Badan Kepegawaian Daerah

2.3 Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berikut ini tercantum isu penting penyelenggaraan dinas berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan, yang mungkin di kemudian hari dapat diselesaikan demi optimalnya pelaksanaan tugas :

1. Tingginya pengangguran karena dampak dari penataan pegawai harian lepas/ honorer;
2. Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja;
3. Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja yang layak pada perusahaan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Ranwal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2025		Program	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tahun 2025	
				Target capaian kinerja	Pagu indikatif					Target capaian kinerja	Pagu indikatif
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PGK	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan	kebijakan	1	167.550.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PGK	Jumlah Kebijakan Pembangunan Ketenagakerjaan Daerah yang ditetapkan	kebijakan	1	167.550.000
<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	PGK	<i>jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>laporan</i>	1	167.550.000	<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	PGK	<i>jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>	<i>laporan</i>	1	167.550.000
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	PGK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	87.890.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	PGK	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	87.890.000
Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	PGK	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	50	79.660.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	PGK	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	orang	50	79.660.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PGK	<i>Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</i>	%	79	3.431.765.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA	PGK	<i>Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan</i>	%	79	3.431.765.000

						KERJA					
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	PGK	jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	laporan	1	3.431.765.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	PGK	jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	laporan	1	3.431.765.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PGK	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	340	3.431.765.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	PGK	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	340	3.431.765.000
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PGK	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	45	174.540.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PGK	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	45	174.540.000
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	PGK	jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	laporan	1	174.540.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	PGK	jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	laporan	1	174.540.000
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	PGK	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui	orang	120	53.840.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	PGK	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem	orang	120	53.840.000

		Sistem Online (Karir Hub)						Online (Karir Hub)			
Job Fair/Bursa Kerja	PGK	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	60	120.700.000	Job Fair/Bursa Kerja	PGK	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	orang	60	120.700.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PGK	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	45	161.305.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PGK	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	%	45	161.305.000
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>PGK</i>	<i>persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB</i>	<i>%</i>	<i>8,48</i>	<i>77.130.000</i>	<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>PGK</i>	<i>persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB</i>	<i>%</i>	<i>8,48</i>	<i>77.130.000</i>
Pengesahan Peraturan Perusahaan	PGK	Jumlah Perusahaan yang	perusahaan	70	45.950.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan	PGK	Jumlah Perusahaan yang	perusahaan	70	45.950.000

bagi Perusahaan		Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				bagi Perusahaan		Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online			
Penyeleng- gaan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	PGK	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	<i>laporan</i>	55	31.180.000	Penyeleng- gaan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	PGK	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	<i>laporan</i>	55	31.180.000
<i>Pencegahan dan Penyelesaia n Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/K ota</i>	PGK	<i>jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>laporan</i>	1	84.175.000	<i>Pencegahan dan Penyelesaia n Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	PGK	<i>jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>laporan</i>	1	84.175.000
Pencegahan Perselisihan	PGK	Jumlah Perselisihan	perkara	50	57.855.000	Pencegahan Perselisihan	PGK	Jumlah Perselisihan	perkara	50	57.855.000

Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		yang Dicegah				Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		yang Dicegah			
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	25	8.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	perkara	25	8.000.000
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan	PGK	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	56	11.420.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan	PGK	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	56	11.420.000

Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi					
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	1	6.900.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	PGK	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	lembaga	1	6.900.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PGK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	1.940.681.450	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PGK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	1.940.681.450
	PGK	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	87			PGK	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai	87	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PGK	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PGK	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	%	100	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PGK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bin	23	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PGK	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bin	23	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat	PGK	Persentase penurunan tingkat pelanggaran	%	-33	70.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat	PGK	Persentase penurunan tingkat pelanggaran	%	-33	70.000.000

<i>Daerah</i>		<i>disiplin ASN</i>				<i>Daerah</i>		<i>disiplin ASN</i>			
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	10	70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PGK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	org	10	70.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	PGK	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	540.391.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	PGK	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	%	100	540.391.450
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	8.770.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PGK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	8.770.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	239.165.850	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK/ Luar PGK	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	239.165.850
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	75.076.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PGK	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	75.076.600
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PGK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	67.379.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	PGK	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	67.379.000
Penyelenggaraan Rapat	PGK	Jumlah Laporan	laporan	1	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat	PGK	Jumlah Laporan	laporan	1	150.000.000

Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	PGK	<i>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	%	100	674.940.000	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	PGK	<i>Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah</i>	%	100	674.940.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	337.470.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	1	337.470.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	337.470.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PGK	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	337.470.000
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	PGK	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100	553.750.000	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	PGK	<i>Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	%	100	553.750.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	laporan	1	85.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	laporan	1	85.000.000

		Daya Air dan Listrik yang Disediakan						Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	46.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	46.250.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	422.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PGK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	422.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PGK	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	101.600.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PGK	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	%	100	101.600.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	28.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PGK	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	28.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan	PGK	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	5	32.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	PGK	Jumlah Kendaraan Dinas	unit	5	32.800.000

n, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				n, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	40.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PGK	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	40.800.000
					5.875.841.450						5.875.841.450

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tidak tersedia usulan program dan kegiatan dari masyarakat untuk tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema RKP pada 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Prioritas Kota Pangkalpinang Tahun 2025 :

1. Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah;
2. Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim
3. Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Serta Daya Saing Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan
5. Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan
6. Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Angkatan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja
7. Peningkatan kualitas pembangunan gender

Pencapaian pembangunan daerah tidak terlepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di Kota Pangkalpinang. Keterkaitan tujuan dan sasaran Dinas dijabarkan melalui tabel keterkaitan tujuan sasaran Kota dengan Dinas, dimana tujuan sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan seperti yang terdapat pada bab empat dokumen Renja ini.

TUJUAN KOTA	IND TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	IND SASARAN KOTA	TUJUAN OPD	IND TUJUAN OPD	SASARAN OPD	IND SASARAN OPD
mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing	Tingkat Kemiskinan	meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan	TPAK	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
							persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi

Kebijakan lain yang menjelaskan mengenai evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Permendagri 18 Tahun 2020. Dari beberapa kegiatan yang terdapat pada Permendagri tersebut, telah diakomodir dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

No.	Substansi kegiatan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020	Diakomodir dalam RPD 2025
1.	Urusan Tenaga Kerja Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencanan tenaga kerja Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi Tingkat produktivitas tenaga kerja Persentase perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenegakaerjaan) Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota - Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/Kota; - Presentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja; - Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kab/Kota; - Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster; - Persentase instruktur bersertifikat kompetensi; - Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan; - Persentase LPK yang terakreditasi; - Persentase LPK yang memiliki perizinan; - Jumlah penganggur yang dilatih; - Persentase lulusan bersertifikat pelatihan; - Persentase penyerapan lulusan; - Lulusan bersertifikat kompetensi; - Jumlah Calon Peserta Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan; - Jumlah pelatihan Calon Peserta Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);	√ √ √ √ √ √ √ √

	- Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER); - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi; - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata; - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan; - Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja; - Data pemberdayaan pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya; Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	√ √ √
--	---	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023 sesuai dengan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023 seperti pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun ke		
				2021	2022	2023
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	50	60	60
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	94,55	67,27	76,36
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	13,03	16,06	19,09

Sedangkan tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 berdasarkan Renstra Transisi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD		Target			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2021	2022	2024	2025	2026	
Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		TPAK	%	65,16	65,78	60	61	62	62
	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100,00	6,89	90,00	90,00	90,00	90,00
		persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6,03	7,09	6,40	6,90	7,10	7,10

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2025 berikut:

Tujuan RPD:
mewujudkan SDM dan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing
Sasaran RPD:
meningkatnya kualitas kesempatan kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja perlu melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan:

Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	07	02				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2	07	02	2	01		KEGIATAN Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2	07	02	2	01	0001	SUB KEGIATAN Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
2	07	02	2	01	0003	SUB KEGIATAN Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2	07	03	2	01		KEGIATAN Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	07	03	2	01	0001	SUB KEGIATAN Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2	07	04	2	03		KEGIATAN Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2	07	04	2	03	0002	SUB KEGIATAN Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
2	07	04	2	03	0003	SUB KEGIATAN Job Fair/Bursa Kerja
2	07	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2	07	05	2	01		KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2	07	05	2	01	0001	SUB KEGIATAN Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2	07	05	2	01	0003	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
2	07	05	2	01		KEGIATAN Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0001	SUB KEGIATAN Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0002	SUB KEGIATAN Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	07	05	2	01	0003	SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
2	07	05	2	01	0004	SUB KEGIATAN Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
2	07	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	07	01	2	02		KEGIATAN <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
2	07	01	2	02	0001	SUB KEGIATAN penyediaan gaji dan tunjangan ASN
2	07	01	2	05		KEGIATAN <i>administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>
2	07	01	2	05	0009	SUB KEGIATAN pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
2	07	01	2	06		KEGIATAN <i>Administrasi Umum perangkat daerah</i>
2	07	01	2	06	0001	SUB KEGIATAN penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
2	07	01	2	06	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	07	01	2	06	0004	SUB KEGIATAN penyediaan bahan logistik kantor
2	07	01	2	06	0005	SUB KEGIATAN penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2	07	01	2	06	0009	SUB KEGIATAN penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2	07	01	2	07		KEGIATAN <i>pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>
2	07	01	2	07	0001	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	07	01	2	07	0002	SUB KEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	07	01	2	08		KEGIATAN <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>

2	07	01	2	08	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	07	01	2	08	0003	SUB KEGIATAN penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2	07	01	2	08	0004	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pelayanan umum kantor
2	07	01	2	09		KEGIATAN <i>pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>
2	07	01	2	09	0001	SUB KEGIATAN penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
2	07	01	2	09	0002	SUB KEGIATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	07	01	2	09	0009	SUB KEGIATAN pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2023	PRAKTIK KAPAIAN RESTRUKTURISASI TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGWA PENANANAN							KELOMPOK SADARAN	PRADIRIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2023	PAQU NOKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAQU REKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH			15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Penerima Berpenghasilan Rendah yang Berpenghasilan yang Berpenghasilan				2 Pkwt	87.379.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kemampuan manajerial, Akademi, Rasio manajerial, dan					

NO	KODE	URUSAN / BRAND URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	WELJUDI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PRAKARAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEMAMPUAN PENCAPAIAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKARAAN MAJU BENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGULUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.07.01.2.06.0001																
			Penyediaan Jasa Konstruksi, Sumber Daya Air dan Listrik				1 Laporan	85.000.000,00	Kota Pangreh Prang, Samud Kacamatan, Samud Koti Dasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pencanguhan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	-	0,00		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0003																
			Penyediaan Jasa Pengadaan dan Perencanaan Kantor				1 Laporan	48.250.000,00	Kota Pangreh Prang, Samud Kacamatan, Samud Koti Dasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pencanguhan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	-	0,00		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004																
			Penyediaan Jasa Pengadaan dan Perencanaan Kantor				1 Laporan	422.500.000,00	Kota Pangreh Prang, Samud Kacamatan, Samud Koti Dasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pencanguhan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	-	0,00		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005																
			Penyediaan Jasa Pengadaan dan Perencanaan Kantor				1 Laporan	101.800.000,00	Kota Pangreh Prang, Samud Kacamatan, Samud Koti Dasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pencanguhan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	-	0,00		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0001																
			Penyediaan Jasa Pengadaan dan Perencanaan Kantor				1 Laporan	28.600.000,00	Kota Pangreh Prang, Samud Kacamatan, Samud Koti Dasa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	Pencanguhan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	-	0,00		DINAS TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0002																
			Penyediaan Jasa Pengadaan dan Perencanaan Kantor				1 Laporan				-	Pencanguhan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah	-			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REKORD OPD	REALISASI CAPAIAN REKORD TAHUN 2023	PRASARANA CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SABARAN	PRASARANA MAJU RENCANA TAHUN 2025		PENGANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kebutuhan Dinas Operasional atau Lapangan yang Operasional dan dibayarkan / yang lain Pemerintah				11 Juli	32.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan manajemen masyarakat Masyarakat RBD model Berbasis desa dan kecamatan Dipilih			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
Pembayaran: Realisasi dan Gaji Karyawan Lainnya																	
			Jumlah Gaji Karyawan dan Gaji Karyawan Lainnya yang Dibayarkan				1 Juli	40.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan manajemen masyarakat Masyarakat RBD model Berbasis desa dan kecamatan Dipilih			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
2	2.07.33	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Kecamatan yang Dibayarkan	1 Kegiatan				187.500.000,00						1 Kegiatan	0,00		
2.07.32.2.01		Pengembangan Tenaga Kerja (PTK)	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Kecamatan yang Dibayarkan	01 Kegiatan			1 Agustus	187.500.000,00						01 Agustus	0,00	DINAS TENAGA KERJA	
Pembayaran: Rencana Tenaga Kerja Lainnya																	
2.07.32.2.01.0001		Pembayaran Rencana Tenaga Kerja Lainnya	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Kecamatan yang Dibayarkan				1 Desember	187.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan manajemen masyarakat Masyarakat RBD model Berbasis desa dan kecamatan Dipilih			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
Pembayaran: Rencana Tenaga Kerja Lainnya																	
2.07.32.2.01.0003		Fasilitas Pengembangan Tenaga Kerja Lainnya	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Kecamatan yang Dibayarkan				1 Desember	187.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkatan manajemen masyarakat Masyarakat RBD model Berbasis desa dan kecamatan Dipilih			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
Pembayaran: Rencana Tenaga Kerja Lainnya																	
3	2.07.33	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Kebutuhan Pembangunan Kecamatan yang Dibayarkan	79 %			79 %	3.437.765.000,00						79 %	0,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KEBANGKOKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PILIHAN DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PASU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.07.04.2.01	2.07.04.2.01	Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi Unit Kompetensi	Jumlah peserta Pelatihan dan Sosialisasi Unit Kompetensi	1 Laporan		1 Laporan	3.431.785.000,00					Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1 Laporan		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.001	2.07.04.2.01.001	Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi Unit Kompetensi	Jumlah peserta Pelatihan dan Sosialisasi Unit Kompetensi	1 Laporan		1 Laporan	3.431.785.000,00					Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1 Laporan		0,00	DINAS TENAGA KERJA
4	2.07.04.2.01	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase jemaah haji yang ditempatkan	45 %		45 %	174.540.000,00					Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		45 %		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	2.07.04.2.01	Pengembangan informasi pasar tenaga kerja	Jumlah jemaah haji yang ditempatkan	1 Laporan		1 Laporan	174.540.000,00					Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat		1 Laporan		0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.000	2.07.04.2.03.000	Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelatihan dan Sosialisasi	Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	120 Orang		120 Orang	53.840.000,00					Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat				0,00	DINAS TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0003	2.07.04.2.03.0003	Pelaksanaan dan Penyelenggaraan Pelatihan dan Sosialisasi	Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi									Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat					

NO	KODE	URUSAN / ELEMEN URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2023	PENCAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENGADAAN						KELOMPOK SASARAN	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Pegawai Kerya yang Mendapatkan Peningkatan Masa Aktif Pensiun Kerya				60 Orang	120.750.000,00	Kota Pangreh Prang, Sema Kacamatan, Sema KadiDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkat nan, Ekspor Peningkat nan, Kamukasa dan Sistem Anggaran Sema KadiDasa Pasar Kerya			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
5.	2.07.00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase hasil penelitian industri yang dibuatkan dengan penggunaan bersama (PGR)	45.00 %			45.00 %	161.308.000,00						45.00 %		0,00	
	2.07.00.2.03	Pengembangan Penelitian Peningkatan Kualitas Produk Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan	Akreditasi perusahaan yang diperoleh dari PGR	31 Perusahaan			8.00 Perusahaan	77.030.000,00						8.00 Perusahaan		0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.00.2.03.0001	Pengembangan Penelitian Peningkatan Kualitas Produk Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan	Akreditasi perusahaan yang diperoleh dari PGR	31 Perusahaan			70 Perusahaan	45.980.000,00	Kota Pangreh Prang, Sema Kacamatan, Sema KadiDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkat nan, Ekspor Peningkat nan, Kamukasa dan Sistem Anggaran Sema KadiDasa Pasar Kerya			0,00	DINAS TENAGA KERJA	
	2.07.00.2.03.0003	Peningkatan Penelitian Peningkatan Kualitas Produk Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Peningkatan	Jumlah Data dan Informasi Sistem Peningkatan Sistem Peningkatan Sistem Peningkatan Sistem Peningkatan Sistem Peningkatan				55.000.000	31.180.000,00	Kota Pangreh Prang, Sema Kacamatan, Sema KadiDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Peningkat nan, Ekspor Peningkat nan, Kamukasa dan Sistem Anggaran Sema KadiDasa Pasar Kerya			0,00	DINAS TENAGA KERJA	

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Transisi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran tujuan sasaran RPD Kota Pangkalpinang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.